



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

2025

**KECAMATAN KESAMBEN
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap program kegiatan yang direncanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Kesamben.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Kesamben lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Saran dan pendapat serta kritik yang membangun dari pengguna LKjIP ini untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan tahun berikutnya akan kami terima dengan senang hati.

Akhirnya apa yang dapat tersaji ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.

Kesamben, 29 Januari 2026


AMIR BHARATA, ST. M.Si.
Pembina Tingkat I
19760116 200212 1003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kesamben Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kesamben ini melaporkan capaian kinerja selama tahun 2025. Sehubungan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan RPJMD dan Renstra 2025-2029, maka analisis capaian kinerja organisasi tahun 2025 disusun berdasarkan perencanaan periode sebelum perubahan yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan periode setelah perubahan yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2025 Kecamatan Kesamben melaksanakan 6 (enam) Program dan 18 (Delapan belas) kegiatan untuk memenuhi 4 Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja 2025 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
- 2) Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; dan
- 4) Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas Kecamatan Kesamben menetapkan 5 (lima) indikator utama yakni :

- 1) Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
- 2) Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan;
- 3) Nilai SAKIP;
- 4) Persentase desa yang memiliki administrasi baik; dan
- 5) Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik.

Adapun capaian indikator utama pada Kecamatan Kesamben Tahun 2025 adalah :

- 1) Indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti, capaian kinerja sebesar 107, 53%, dari target sebesar 93% terealisasi sebesar 100%;
- 2) Indikator Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan, capaian kinerja sebesar 105,26% dari target sebesar 95% terealisasi sebesar 100%;
- 3) Indikator Nilai SAKIP capaian kinerja sebesar 103,31% dari target sebesar 71 terealisasi sebesar 73,35;

- 4) Indikator Persentase desa yang memiliki administrasi baik, capaian kinerja sebesar 98,59% dari target sebesar 71% terealisasi sebesar 70%; dan
- 5) Indikator Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik, capaian kinerja 7 Bumdes dari target sebesar 7 Bumdes sehingga terealisasi 100%.

Capaian kinerja selama tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben telah berhasil memenuhi dan mencapai target sasaran sesuai Renstra tahun 2021- 2025. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 dengan 1 tujuan dan 3 Sasaran yaitu :

- 1) Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan;
- 2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kecamatan Kesamben menetapkan 3 (tiga) indikator utama yaitu :

- 1) Persentase Desa Mandiri di Kecamatan;
- 2) Angka Kriminalitas di Kecamatan;
- 3) Nilai SAKIP.

Untuk melaksanakan aktivitas tersebut disediakan pagu anggaran sebesar : Rp. 2.135.105.859,00. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data, capaian indikator utama pada Kecamatan Kesamben Tahun 2025 adalah :

- 1) Indikator Persentase desa Mandiri di Kecamatan, capaian kinerja sebesar 100%, dari target sebesar 70% terealisasi sebesar 70%;
- 2) Angka Kriminalitas di Kecamatan, capaian kinerja sebesar 116,67% dari target sebesar 7 terealisasi sebesar 6;
- 3) Indikator Nilai SAKIP capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 73,35 terealisasi sebesar 73,35.

Adapun realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 2.066.241.574,00 atau sebesar 96,77%.

Capaian kinerja selama tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben telah berhasil memenuhi dan mencapai target sasaran sesuai Renstra tahun 2025-2029. Sasaran Strategis Kecamatan Kesamben ditetapkan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana setiap bagian dan unit kerja melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, serta melaksanakan upaya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Disamping itu, analisa juga dilakukan dalam mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, serta upaya dalam rangka melaksanakan Fungsi Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

COVER.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	3
C. Dasar Hukum	1
D. Sistematika Dokumen	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	3
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	5Error! Bookmark not defined.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sasaran Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Error! Bookmark not defined.
3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
4. Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	41
B. Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Tindak Lanjut	Error! Bookmark not defined.
Lampiran-Lampiran.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	3
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar masalah ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5	Rincian Anggaran Pada Tahun 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1.1.1	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1.1.2	Pengelompokan nilai dan predikat kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.1.1	Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.1.2	Data Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.1.3	Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.1.4	Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa terhadap target jangka menengah Renstra	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.1.5	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.1.6	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.2.1	Realisasi kinerja sasaran meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.2.2	Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.2.3	Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.2.4	Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terhadap target jangka menengah Renstra	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.2.5	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.2.6	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.3.1	Realisasi kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.3.2	Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.3.3	Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap target jangka menengah Renstra	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.3.4	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.3.5	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2.4.1	Realisasi kinerja sasaran meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	42
Tabel 3.2.4.2	Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa	43
Tabel 3.2.4.3	Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa terhadap target jangka menengah Renstra	44
Tabel 3.2.4.4	Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan	45
Tabel 3.2.4.5	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa	49

Tabel 3.3.1 Realisasi kinerja dan keuangan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
dan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

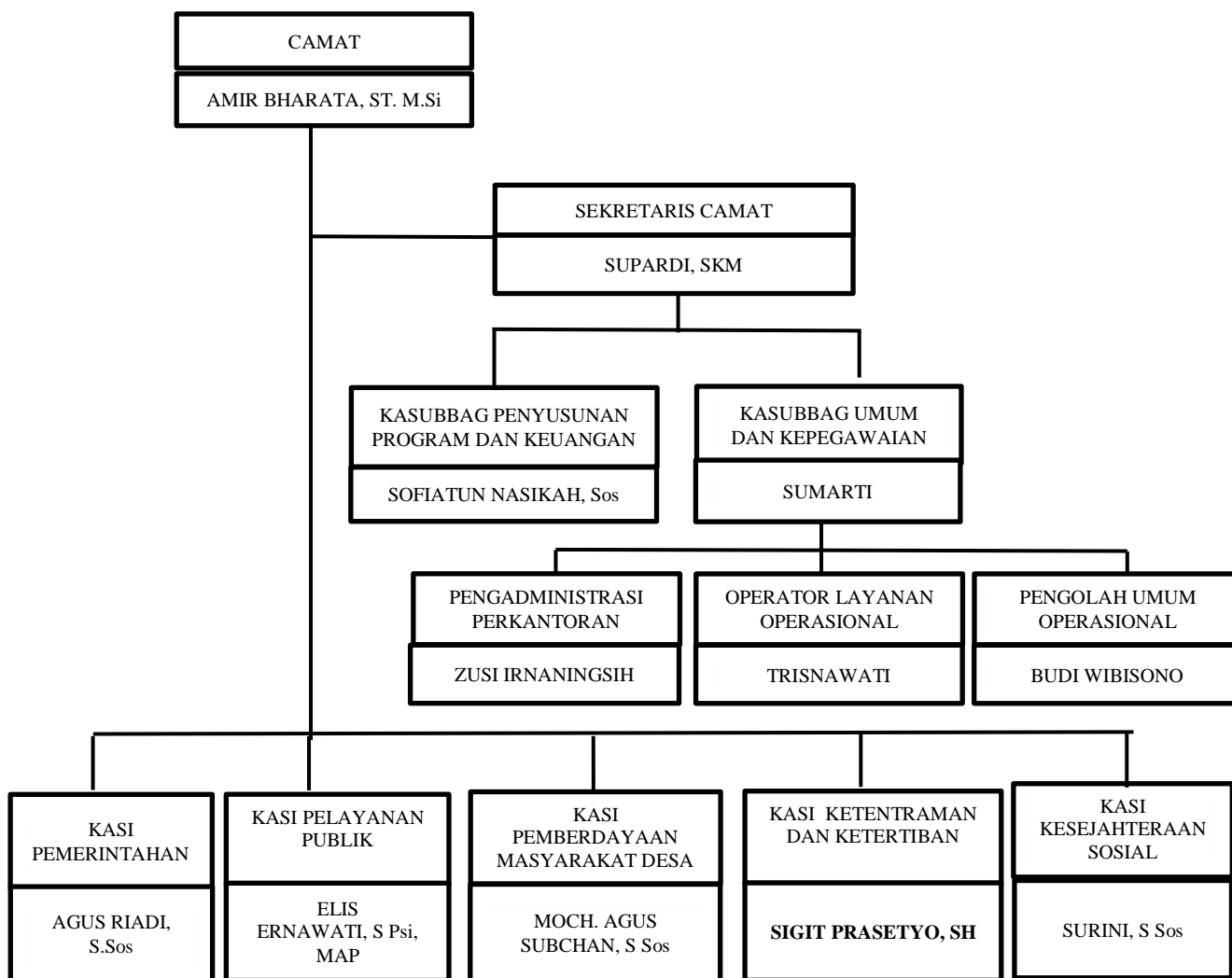
Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan Kepala Seksi. Adapun susunan organisasi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar. 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KESAMBEN



Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar di dukung Sumber daya manusia sebanyak 13 orang yang terdiri ASN sebanyak 12 Orang, dan Non ASN sebanyak 1 orang tersebut terbagi kedalam jabatan Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pelaksana, P3K, P3K paruh waktu dan Petugas Kebersihan.

Berikut data ASN pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tahun 2025

Tabel 1.1
Data ASN dan Non ASN Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Camat	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Seksi	5 Orang
4	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5	Pelaksana	1 Orang
6	P3K	1 Orang
7	P3K Paruh waktu	1 Orang
8	Petugas Kebersihan	1 Orang
	Total	13 Orang

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke- 3 yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat, Sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat:

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Kesamben, dapat diuraikan permasalahan pembangunan/issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1.2
Isu Strategis Kecamatan Kesamben

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Komposisi penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.	Angka putus sekolah yang masih tinggi	Pergeseran Demografi Global Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih relatif tingginya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja serta tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih relatif tinggi	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Perkembangan Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program ekonomi dan kewirausahaan serta program program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
---	-------------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------------------------	---	---

3	<p>Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</p> <p>Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas</p>	<p>Belum optimalnya produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi inklusif</p> <p>Belum optimalnya perkembangan UMKM karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global. Belum optimalnya pengelolaan koperasi. Rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat</p>	<p>Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan</p>	<p>Persaingan Sumber Daya Alam Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA</p>	<p>Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi</p>	<p>Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah</p>	<p>Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian</p>
---	--	--	--	---	--	---	--

4	Infrastruktur Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama pembangunan Jalur Lintas Selatan (Pansela)	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur persampahan masih minim		Infrastruktur dan literasi digital rendah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Memiliki pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang berkualitas Terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah karena kekeringan.	Pengelolaan sampah; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pengelolaan kawasan hutan	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

6	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan predikat sangat inovatif	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah	Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	Tata Kelola pemerintahan belum optimal Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik
---	--	---	---	---	---	--	--

Sumber : Renstra 2025-2029

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

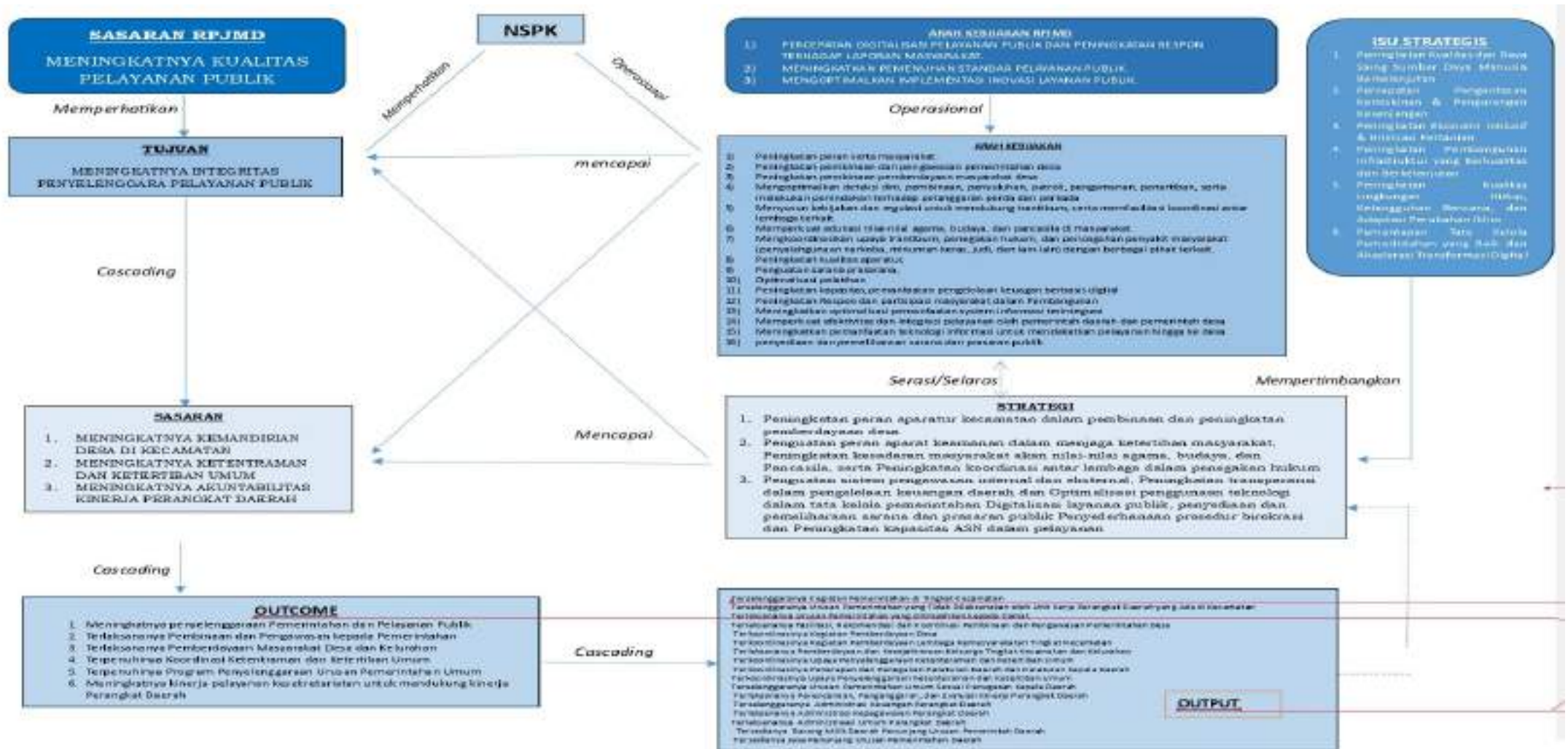
Tabel 1.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kesamben

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP

Sumber : (Kecamatan Kesamben), 2025

Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:

Gambar 1.2. Cascading Kecamatan Kesamben



C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di

- Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

D. Sistematika Dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan seistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik hingga ke desa	Presentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang di tindaklanjuti	93 %
2	Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	95 %
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	71
4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	71 %
		Jumlah BUMDES yang di kelola Dengan Baik	7

Sumber : (Kecamatan kesamben),2025

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	70 %
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Angka kriminalitas di Kecamatan	7
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	73,35

Sumber : (Kecamatan kesamben),2025

Pada Kecamatan Kesamben terjadi perubahan perjanjian kinerja di sebabkan karena terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja di Kecamatan Kesamben. Hal ini karena adanya perubahan penentuan tujuan kecamatan yang disesuaikan dengan Renstra tahun 2025-2029, sehingga sasaran dan indikator kinerja harus diselaraskan.

Pada periode restra tahun 2021-2025, terdapat 3 (tiga) tujuan Kecamatan Kesamben yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
- 2) Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat; dan
- 3) Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah.

Yang masing-masing memiliki sasaran strategis yang selanjutnya diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kecamatan.

Sedangkan pada Renstra 2025-2029 ditetapkan satu tujuan Kecamatan Kesamben yaitu Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Perubahan tujuan ini harus dilakukan karena sesuai dengan Cascading Renstra 2025-2029, tujuan kecamatan mengacu pada sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dimana penentuan tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik. Kemudian, untuk penentuan sasaran kecamatan ditetapkan agar selaras tujuan Renstra dan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu

- 1) Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan dengan indikator Persentase desa Mandiri di Kecamatan;
- 2) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Angka Kriminalitas di Kecamatan; dan
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Sakip.

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.135.105.859,- terbilang Dua Milyar seratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah dengan rincian sebagaimana tabel 2.3

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.850.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.900.000,00
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.075.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	31.880.000,00
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja PD	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	29.770.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.953.630.859,00
Total Anggaran			2.135.105.859,00

Sumber : Kecamatan Kesamben, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1. Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang di tindaklanjuti. Definisi operasional dari indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang di tindaklanjuti adalah Definisi operasional dan formulasi perhitungan kinerja indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti :

$$\frac{\sum \text{Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti tahun } n}{\sum \text{Keluhan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan tahun } n} \times 100\%$$

Penjelasan :

Keluhan masyarakat terkait pelayanan yang ada di Kecamatan yaitu terkait pelayanan Administrasi Kependudukan, Surat Keterangan waris, Pelayanan Surat Perijinan, dan Surat Keterangan lainnya.

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa adalah sebesar 107,53% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang di tindaklanjuti	93%	100%	107,53%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					107,53%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, indikator indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti, adalah hasil dari jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun ke-n dibagi jumlah seluruh keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan tahun ke-n yang hasilnya dikalikan 100%. Adapun keluhan masyarakat terkait pelayanan yang ada di Kecamatan yaitu terkait pelayanan Administrasi Kependudukan adalah lambatnya cetak KTP karena keterbatasan keping KTP, namun sudah ditindaklanjuti dengan

meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sehingga ketersediaan keping KTP tidak ada hambatan, disamping itu dengan adanya pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat tidak harus menunggu keping KTP untuk mendapatkan cetak identitasnya.

Dalam hal Pelayanan Surat menyurat, Surat Perijinan, surat perjanjian waris, Pengesahan Surat/Proposal, surat izin dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan Kesamben. dapat terlayani dengan baik sesuai prosedur yang telah ditentukan sehingga masyarakat tidak mengalami kendala dan tidak didapati keluhan dari masyarakat. Namun untuk pelayanan perekaman kartu identitas digital bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Kesamben belum maksimal dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan sumber daya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. indikator Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti menargetkan dalam kinerja dengan nilai 93% dan berhasil tercapai dengan nilai 100%.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa mengalami peningkatan di banding tahun 2023 dan 2024. Peningkatan kinerja ini lebih banyak di sebabkan oleh :

- a. Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
- e. Telah melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan telah berdaya upaya agar kegiatan pemerintahan, terutama kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, prima dan memuaskan. Pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pelayanan yang cepat dan ramah memberi dampak yang sangat baik sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan di Kecamatan.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 dan 2025:

Tabel 3.2
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n (2025)	Tahun n (2025)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n-2 (2025)
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	93 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Kecamatan kesamben, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian Akhir dari periode Renstra 2021-2025, yang berarti telah tercapai 100% dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada akhir periode Renstra. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.3
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa terhadap target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n (2025)	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	95 %	100 %	105,26%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan tetangga maka capaian Kecamatan kesamben ini sama realisasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wlingi.

Tabel 3.4
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kecamatan Binangun Tahun 2025	Realisasi Kecamatan Wlingi Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Kasubag sungram Kec. Binangun dan Kec. Wlingi

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang prima oleh petugas pelayanan Kecamatan;
2. Koordinasi dan Pembinaan bagi Petugas Registrasi Desa sebagai ujung tombak pelayanan administrasi kependudukan;
3. Mengoptimalkan pemberian Informasi Layanan melalui Website,WA, Instagram.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik sampai ke desa adalah sebagai berikut.

1. Seringnya gangguan server pada pelayanan adminduk dan jaringan internet.
2. Keterbatasan Sumber daya manusia di Kecamatan Kesamben, sehingga menyebabkan beberapa petugas merangkap jabatan.

Bahwa kegiatan yang sudah dibuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka mendukung capaian kinerja

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan pada
Sasaran meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik
sampai ke desa

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rapat evaluasi PBB, Rapat Koordinasi	Terselenggaranya rapat evaluasi PBB, Rapat Koordinasi yang dilakukan dengan pamong blok
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelayanan yang diselenggarakan dengan baik, tepat waktu	SDM yang mumpuni sehingga Pelayanan dapat diselenggarakan dengan baik, tepat waktu
		Kegiatan Pelaksanaan	Rapat Koordinasi	SDM yang mumpuni sehingga Pelayanan

		Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	si dan pelaksanaan Adminduk	adminduk dapat diselenggarakan dengan baik, Tidak tepat Waktu di sebabkan server dan Internet sering gangguan
--	--	---	-----------------------------	---

Sumber Kecamatan kesamben, 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa adalah sebesar Rp.29.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.29.740.000,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa

Tabel 3.6
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian
sasaran kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	107,53%	program penyele nggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	29.770.000	29.740.000	99,90%
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.050.000	14.020.000	99,79%
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.950.000	8.950.000	100%
			Sub Kegiatan Peningkatan	5.100.000	5.070.000	99,41%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
			Kegiatan Penyeleng garaan Urusan Peme rintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.600.000	6.600.000	100 %
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.600.000	6.600.000	100 %
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.120.000	9.120.000	100%
			Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.120.000	9.120.000	100%
			Realisasi Anggaran	29.770.000	29.740.000	99,90%
			Tingkat efisiensi			0,10%

Sumber:LRA sd 31 Desember 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik sampai ke desa 0,10%. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 107,53% sedangkan realisasi

anggaran diperoleh sebesar 99,90%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik sampai ke desa dengan nilai efisiensi sebesar 0,10%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar 29.770.000,00 dengan realisasi sebesar 29.740.000,00 menunjukkan adanya penghematan sebesar Rp 30.000,00 yang berasal dari belanja fotocopy

2. Efisiensi SDM

Dengan SDM yang mumpuni pelayanan di kecamatan cukup dilakukan 2 orang staf, 1 orang di bagian resepsionis dan 1 orang di bagian perkaman dan Cetak KTP.

3. Efisiensi Waktu

Dengan SDM yang Mumpuni dan di dukung oleh teknologi Informasi (pelayanan melalui WA dan IG) pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien waktu

Dokumentasi kegiatan
sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke
desa



Pelayanan Surat keterangan Waris



Pelayanan IKD



Pelayanan Rekam data bagi wajib KTP Pemula

2. Sasaran Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Presentase Gangguan Trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan. Definisi operasional dari indikator Presentase Gangguan Trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan adalah Definisi Operasional dan formulasi penghitungan kinerja pada indicator Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan adalah :

$$\frac{\sum \text{Jumlah gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan tahun } n}{\sum \text{Jumlah gangguan trantibum di wilayah tahun } n} \times 100\%$$

Penjelasan :

- Gangguan ketentraman dan ketertiban yang ada di wilayah Kecamatan.

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar 105,26% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	95%	100%	105,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					105,26%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, indikator pertama Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan dapat direalisasi sebesar 105,26 %.

Yang dimaksud Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang dapat

diselesaikan, adalah hasil dari jumlah gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tahun ke-n dibagi jumlah seluruh gangguan trantibum tahun ke-n yang hasilnya dikalikan 100%. Adapun gangguan trantibum yang dimaksud adalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah kecamatan Kesamben pada tahun ke-n. Pada tahun 2025 targetnya 95% tercapai 100%. Seluruh gangguan trantibum di wilayah Kecamatan Kesamben dapat ditangani dengan baik. Adapun data gangguan trantibum selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Kejadian	Jumah Gangguan Trantibum	Jumlah Gangguan yang belum diselesaikan	Jumlah gangguan trantibun yang diselesaikan
1	Pencurian	5	0	5
2	Perampokan	0	0	0
3	Perjudian	0	0	0
4	Penipuan	0	0	0
5	Tindak Asusila	1	0	1
6	Penyalahgunaan Narkoba	0	0	0
Jumlah		6	0	6

Sumber : Polsek Kesamben

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Realisasi kinerja dapat dipertahankan karena adanya sinergi antara Pemerintah Kecamatan Kesamben dengan TNI/Polri dan pemerintah desa dalam melaksanakan pengamanan di wilayah. Disamping itu juga adanya koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kesamben , untuk bersama – sama dalam menjaga keamanan di Kecamatan Kesamben; Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 dan tahun 2024

Tabel 3.9
Perkembangan kinerja sasaran
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n (2025)	Tahun n (2025)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n-2 (2023)
1	Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum di wilayah yang dapat di selesaikan	95 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Kecamatan Kesamben 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian Akhir dari periode Renstra 2021-2025, yang berarti telah tercapai 100% dari target tahun terakhir Renstra atau telah melampaui target Renstra pada tahun 2025 Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.10
Pencapaian kinerja sasaran
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	95 %	100%	105,26%

Sumber: Kecamatan Kesamben 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan Tetangga maka capaian ini adalah sama. dapat disimpulkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kesamben dan sekitarnya cenderung kondusif. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang memiliki karakter yang hampir sama di wilayah ini, dimana masyarakat Blitar bagian

timur dan selatan masih menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian pada lingkungan sehingga kondisi wilayah cenderung aman. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan, TNI/Polri dan masyarakat memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja.

Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wlingi.

Tabel 3.11
Perbandingan capaian kinerja di Kecamatan Tetangga

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan Binangun	Realisasi Kecamatan Wlingi
1	Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

Sumber:Kecamatan kesamben, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya;
- e. Dilakukannya koordinasi lintas instansi terutama dengan TNI/Polri dan tenaga relawan dari Ormas (RAPI, Perguruan Silat, Pecalang, Forkom, Banser) di wilayah Kecamatan Kesamben untuk sinergitas program/kegiatan
- f. Dilaksanakan kegiatan konkrit mencakup koordinasi dengan pemuka agama untuk sosialisasi supremasi hukum, fasilitasi pengamanan bencana, serta pembinaan siskamling (sistem keamanan lingkungan). Pendekatan persuasif

seperti surat teguran dan preventif seperti peningkatan kesadaran masyarakat juga telah diterapkan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Koordinasi ketentraman dan Ketertiban umum adalah sebagai berikut.

1. Kurang terjalannya komunikasi yang baik antar lembaga sehingga ada masalah yang lambat dalam penyelesaian;
2. Keterbatasan personil Trantib

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam mencapai
Sasaran meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Koordinasi Keamanan dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi yang entensif dengan Polsek, Koramil dan Banse, pecalag, Forkom
...	...	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi dan Bimtek meningkatkan kapasitas SDM dalam Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sumber Kecamatan Kesamben , 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum adalah sebesar Rp.70.955.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 70.939.000,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3.13
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian
sasaran meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Koordinasi Keamanan dan ketertiban umum	105,26%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.955.000	70.939.000	99,98
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.045.000	32.029.000	95,77
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.945.000	25.929.000	99,94
			Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.100.000	6.100.000	100
			Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	7.030.000	7.030.000	100

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.880.000	31.880.000	100
			kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.880.000	31.880.000	100 %
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.600.000	13.600.000	100 %
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	8.150.000	8.150.000	100

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Nasional			
			Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.130.000	10.130.000	100
			Realisasi Anggaran	70.955.000	70.939.000	99,98
			Tingkat efisiensi			0,02 %

Sumber: Kecamatan Kesamben ,2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 105,26% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,98%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan nilai efisiensi sebesar 0,02%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp 70.955.000,00 terealisasi sebesar Rp Rp 70.939.000,00 menunjukkan adanya hemat anggaran sebesar 0,02% yang merupakan penghematan dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pada penyelenggaraan upacara.

2. Efisiensi SDM

Dengan keterbatasan jumlah personil kecamatan, namun SDM yang mumpuni sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

3. Efisiensi Waktu

Durasi atau waktu yang digunakan telah sesuai dengan perencanaan kinerja. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kesamben

DOKUMENTASI KEGIATAN SASARAN MENINGKATNYA KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



Halal Bi Halal Dengan Forkopimcam ,Semua Perangkat Desa Dan Instansi samping



Upacara hari lahir pancasila



Latihan persiapan Upacara HUT RI



Pengukuhan Paskibra



Foto bersama setelah pelaksanaan Upacara HUT RI



Kirab Budaya haul Eyang Jugo

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP. Definisi operasional dari indikator Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Kesamben. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 99%: sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	71	73,35	103,31%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					103,31%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Berdasarkan tabel 3.14 diatas, Indikator Nilai SAKIP dapat direalisasikan sebesar 73,35. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dimaksud indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pemerintah yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Dimana setiap hasil akan disampaikan dan tercantum dalam Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Ditargetkan perolehan nilai hasil Evaluasi SAKIP di tahun 2025 adalah 71, namun berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kesamben yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai dengan LHE Nomor : R/900.15.03.03/699/409.9.4/2025 Tanggal 29 Juli 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 73,35.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mengalami Kenaikan jika dibandingkan dengan 2023 dan tahun 2024. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai tahun 2025 .:

Tabel 3.15
Perkembangan kinerja
sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n (2025)	Tahun n (2025)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n-2 (2023)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	71	73,35	60,55	60,07

Sumber:Kecamatan Kesamben, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2025, yang berarti telah tercapai 103,31% dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.16
Pencapaian kinerja sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n (2025)	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP	72	73,35	101,87 %

Sumber: Kecamatan kesamben ,2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan Tetangga maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan Binangun dan kecamatan Wlingi.

Tabel 3.17
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan Binangun	Realisasi Kecamatan Wlingi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,35	72,90	58,33

Sumber: Kecamatan kesamben, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan melakukan analisa resiko kecamatan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat;
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya;
- e. Peningkatan pemahaman staf terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- f. Reviu dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk memastikan keselarasan antar Renstra, program, dan indikator

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Sumber daya manusia di Kecamatan Kesamben sehingga menyebabkan capaian kinerja tidak maksimal;
- 2) Kurangnya keselarasan dokumen perencanaan, orientasi hasil yang lemah, dan keterkaitan program dengan Renstra;
- 3) Keterbatasan tim percepatan SAKIP dan minimnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja Dalam menunjang keberhasilan pengukuran kinerja.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.18

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan
dalam mencapai Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel mendukung pencapaian kinerja.
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan anggaran yang akuntabel mendukung pencapaian kinerja.
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembinaan pegawai dan pelayanan pada pegawai meningkatkan kepuasan pegawai pada pelayanan kecamatan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan kebutuhan memberi pengaruh yang

		Daerah	Pemerintah Daerah	positif bagi pencapaian kinerja kecamatan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang yang akuntabel dan berkompeten membantu pencapaian kinerja kecamatan baik
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemeliharaan Barang milik daerah menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kecamatan maksimal.

Sumber: Kecamatan kesamben 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 1.953.630.859,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.884.912.574,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.19
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	103,31%	PROGRAM	1.953.630.8	1.884.912.5	98,38
			PENUNJANG URUSAN	59	74	
			PEMERINTAHAN			
			DAERAH			
			KABUPATEN/KOTA			
			Kegiatan	3.918.000	3.897.000	99,46
			Perencanaan,			
			Penganggaran, dan			
			Evaluasi Kinerja			
	Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan		3.918.000	3.897.000	99,46	
	Penyusunan Dokumen					
	Perencanaan Perangkat					
	Daerah					
	Kegiatan Administrasi		1.485.448.8	11.422.000.	99,54	
	Keuangan Perangkat		15	707		
	Daerah					
	Sub kegiatan		1.440.778.8	1377.330.70	95,60	
	Penyediaan Gaji dan		15	7		
	Tunjangan ASN					
	Sub Kegiatan		39.060.000	39.060.000	100	
	Penyediaan					
	Administrasi					
	Pelaksanaan Tugas					
	ASN					
	Sub kegiatan Koordinasi		4.080.000	4.080.000	100	
	dan Pelaksanaan					
	Akuntansi SKPD					
	Sub Kegiatan		1.530.000	1.530.000	100	
	Koordinasi dan					
	Penyusunan Laporan					
	Keuangan					
	Bulanan/Triwulanan/Se					

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			mesteran SKPD			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.850.000	2.850.000	100
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.850.000	2.850.000	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	4.500.000	90
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	4.500.000	90
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.494.350	81.301.000	99,76
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.112.500	4.030.000	97,99
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.565.600	3.506.000	98,33
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.281.750	3.235.000	98,58
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.840.000	7.840.000	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.844.500	58.840.000	99,99
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.850.000	3.850.000	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.926.100	20.757.000	99,19

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pengadaan Mebel	0	0	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.926.100	20.757.000,00	99,19
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.563.594	116.296.279	81,98
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.089.000	24.228.496	89,44
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.114.500	25.910.000	99,22
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.360.094	66.157.783	99,70
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.430.000	233.310.588	99,52
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.156.588	99,94
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000	8.520.000	99,53
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.670.000	157.634.000	99,35
			Realisasi Anggaran	1.953.630.859	1.884.912.574	98,38
			Tingkat efisiensi			1,62%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 103,31% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98,38%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 1,62%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp 1.953.630.859,00 realisasi Rp 1.884.912.574,00 menunjukkan adanya penghematan sebesar 1,62% yang berasal dari penggunaan anggaran untuk belanja modal peralatan kantor, disamping itu terdapat sisa pagu anggaran gaji dan tunjangan pegawai.

2) Efisiensi SDM

Sumber daya manusia dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kesamben. Meskipun minimnya jumlah personil. Namun kinerja dapat tercapai dengan baik.

3) Efisiensi Waktu

Pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di kecamatan Kesamben dalam kurun waktu 2025 dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh kegiatan dan pelaporan dapat dikerjakan sesuai dengan target waktu

Dokumentasi kegiatan
sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Kegiatan Desk TL APIP



Rapat staf evaluasi Kinerja



Review Laporan Keuangan



Asistensi penyusunan Renstra 2025- 2029



Rapat Inovasi daerah



4. Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Persentase desa yang memiliki administrasi baik dan Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik. Definisi Operasional dan formulasi perhitungan kinerja pada indikator Persentase desa yang memiliki administrasi baik adalah :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Desa yang memiliki administrasi baik tahun } n}{\sum \text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Desa yang memiliki administrasi baik : -

1. Memiliki Profil Desa;
2. Memiliki dan memahami dokumen Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
3. Memiliki Buku-Buku Pencatatan Aset Desa dan diisi dengan tertib dan sesuai petunjuk pengisian;
4. Memiliki dan memahami dokumen Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa;
5. Memiliki Buku-buku Administrasi Desa dan diisi sesuai dengan petunjuk pengisian.

Definisi Operasional dan formulasi perhitungan kinerja pada indikator Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik adalah :

Jumlah BUMDes di Kecamatan Tahun-n dengan administrasi baik

Penjelasan :

BUMDes memiliki Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, Permodalan, Unit Usaha, Program kerja dan tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Sasaran strategis Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa terdapat dua indikator. Yang pertama persentase desa yang memiliki administrasi baik adalah jumlah desa yang memiliki administrasi baik dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan Kesamben dan hasilnya dikalikan 100%. Adapun penilaian administrasi desa dilakukan setiap tahun dengan berpedoman pada Permendagri No 47 Tahun 2016 Tentang

Administrasi 40 Desa.

Sedangkan yang kedua yaitu indikator Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik adalah data jumlah Bumdes di wilayah Kecamatan Kesamben pada tahun ke-5 yang dikelola dengan baik, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar 109% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.20
Realisasi kinerja sasaran meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi baik	71%	70 %	98,59
		Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik	7 Bumdes	7 Bumdes	100%
Capaian Kinerja					99,30

Sumber: Kecamatan Kesamben 2025

Berdasarkan tabel 3.20 diatas, indikator pertama Persentase desa yang memiliki administrasi baik dapat direalisasi sebesar 70% dari target 71% sehingga capaiannya adalah 98,59%. Sedangkan indikator kedua yaitu Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik realisasinya adalah 7 dari target 7 Bumdes sehingga capaiannya adalah 100%. Setelah dirata-rata maka capaian kinerja sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa adalah 99,30%. Berdasarkan hasil penilaian Administrasi Desa di Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri No 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Desa, diperoleh hasil bahwa seluruh Desa di Kecamatan Kesamben sejumlah 10 desa, 7 Desa yang memiliki administrasi yang baik (100%). Indikator yang kedua yaitu Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik dengan target 7 Bumdes. Berdasarkan data terdapat 7 Bumdes di wilayah Kecamatan Kesamben

yang dikelola dengan baik. Yaitu sebagai berikut :

1. BUM Desa SEJAHTERA DESA KEMIRIGEDE Desa Kemirigede;
2. BUM Desa BUMDESA USAHA MAKMUR TEPAS Desa Tepas;
3. BUM Desa PANGGUNG LESTARI Desa Pagerwojo;
4. BUM Desa BUMDESA SLUMBUNG KESAMBEN Desa Kesamben;
5. BUM Desa GUNUNG LESTARI Desa Pagergunung;
6. BUM Desa SERBA USAHA JUGO Desa Jugo;
7. BUM Desa MAKMUR ABADI Desa Sukoanyar;

Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengalami Peningkatan di banding tahun 2023 dan tahun 2024. Peningkatan kinerja ini lebih banyak di sebabkan oleh :

- a. Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat;
 - b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
 - c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
 - e. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan
- Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.21
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun N (2025)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n-2 (2023)
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan	Persentase Desa yang memiliki administrasi baik	70 %	100 %	100%	100%

	Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik	7	7 Bumdes	6 Bumdes	5 Bumdes
--	------------------------------	---	---	----------	----------	----------

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2025, yang berarti telah tercapai 89,74% dari target akhir Renstra.

Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra..

Tabel 3.22
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan masyarakat Desa terhadap target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 25	Persentase capaian
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi baik	78%	70 %	89,74 %
		Jumlah Bumdes yang di kelola dengan baik	8 Bumdes	7 Bumdes	87,5 %
	Rata-rata capaian kinerja				88,62%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2025, yang berarti telah tercapai 88,62% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan tetangga maka capaian ini Sama tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya peningkatan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa agar berdampak lebih baik dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan Binangun dan kecamatan Wlingi .

Tabel 3.23
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kecamatan Binangun Tahun 2025	Realisasi Kecamatan Wlingi Tahun 2025
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi baik	89,74 %	100%	100%
		Jumlah Bumdes yang di kelola dengan baik	7	8	4

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- 2) Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- 3) Koordinasi rutin setiap hari senin di pimpin oleh Bapak Camat dengan Para

Sekdes di wilayah kecamatan kesamben untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;

- 4) Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya.
- 5) Dilakukannya koordinasi lintas instansi (Rakor Setiap Bulan) untuk sinergitas program/kegiatan

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya komunikasi yang intensif antara Kasi Yang membidangi dengan pemerintah Desa.
2. Keterbatasan Sumber daya manusia di Kecamatan Kesamben capaian kinerja tidak maksimal.
3. Ketergantungan pendapatan desa pada ADD dan Dana Desa, sehingga memerlukan penguatan tata kelola dan kualitas belanja desa

Tabel 3.24

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan dalam Sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa serta pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan musrenbang yang diikuti oleh lembaga masyarakat se kecamatan Kesamben memberi dampak positif bagi pembangunan daerah

desa				
...	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pembinaan BUMDEs dilaksanakan melalui Bimtek bagi pengelola BUMBDEs di seluruh desa Se Kecamatan Kesamben.
		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelaksanaan pembinaan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan dilaksanakan melalui pembinaan karakter keluarga, sosialisasi pentingnya pendidikan bagi keluarga, dan pembinaan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas	Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh kecamatan baik

		an Pemerinta han Desa		dalam penyusunan APBDes/APBDesP dan perdes/Perkades meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa
			Terselenggara nya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dilaksanakan oleh kecamatan memberi dampak meningkatnya pemahaman desa tentang pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

ii. Sumber: Kecamatan Kesamben 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebesar Rp. 51.088.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 51.080.000,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa

Tabel 3.25
 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Pembinaan dan pengawasan
 Pemerintahan desa seta Pemberdayaan masyarakat Desa

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa	99,30%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.900.000	50.800.000	99,80
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.900.000	50.800.000	99,80
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.800.000	12.800.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.100.000	6.100.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.750.000	6.750.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.700.000	6.700.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.500.000	4.500.000	100

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.550.000	9.450.000	98,95
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.500.000	4.500.000	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.850.000	29.850.000	100
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.950.000	13.950.000	100
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.050.000	7.050.000	100
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.900.000	6.900.000	100
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.720.000	12.707.000	99,9
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan	15.900.000	15.900.000	99,9

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			
			Realisasi Anggaran	80.750.000	80.650.000	99,94
				Tingkat efisiensi		0,06%

Sumber: Kecamatan Kesamben 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 99,30% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,94%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan nilai efisiensi sebesar 0,06 %. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp 80.750.000,00 realisasi sebesar Rp 80.650.000,00 menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,06% yang berasal dari penggunaan anggaran pembinaan kepada masyarakat yang dapat dilakukan penghematan sehingga dapat di efisiensi penggunaannya.

2. Efisiensi SDM

Sumber daya manusia yang ada dapat dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada dapat melaksanakan tugasnya dalam hal pembinaan meskipun dalam anggaran yang minimal.

3. Efisiensi Waktu

Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target waktu dan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan.

Dokumentasi kegiatan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Rapat Koordinasi Bumdesma



Sosialisasi PBB P2



Evaluasi PBB P2



Pembinaan Lomba Desa,
Desa Bumirejo, Desa Tapakrejo dan Desa Sukoanyar



Evaluasi APBDesa Jugo



Pertemuan Rurin PKK se kecamatan kesamben



Kegiatan Senam Lansia Kecamatan Kesamben

Selanjutnya, berdasarkan penetapan RPJMD dan Renstra 2025-2029, maka analisis capaian kinerja organisasi tahun 2025 juga disusun berdasarkan perencanaan setelah perubahan yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025:

1. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase desa Mandiri di Kecamatan. Definisi operasional dari indikator Persentase desa Mandiri di Kecamatan adalah Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan.

Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100%. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan adalah sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.26

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	70%	70%	100.%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					100.%

Sumber: Kecamatan kesamben 2025

Berdasarkan tabel 3.26 diatas, indikator Persentase desa Mandiri di Kecamatan dapat direalisasi sebesar 70% dari target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebesar 70% sehingga terealisasi 100%. Adapun data yang diperoleh dari Status Indeks Desa Tahun 2025, terdapat 7 desa yang masuk kategori Desa Mandiri yaitu :

1. Desa Kemirigede;
2. Desa Tepas;
3. Desa Pagerwojo;
4. Desa Pagergunung;
5. Desa Kesamben;
6. Desa Jugo; dan
7. Desa Siraman.

Sedangkan desa yang masuk kategori maju adalah :

1. Desa Sukoanyar;
2. Desa Bumirejo;
3. Desa Tapakrejo.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan dengan indikator Persentase desa mandiri di kecamatan belum dapat disandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pada periode Renstra 2021-2025 belum menggunakan indikator tersebut dalam sasaran yang ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 70% dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025.

Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.27
Pencapaian kinerja
sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan
terhadap target akhir Renstra

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	100%	70%	70%

Sumber:Kecamatan Kesamben 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja dengan kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Binangun dan kecamatan Wlingi capaian ini lebih tinggi, Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sudah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Sehingga perlu upaya peningkatan. Berikut perbandingan capaian kinerja dengan tingkat Kecamatan di sekitar.

Tabel 3.28

Perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan Binangun	Realisasi Kecamatan Wlingi
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	70%	66 %	68 %

Sumber: Kasubag Sungram kec Binangun dan Kec Wlingi

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat;
- 2) Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- 3) Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- 4) Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya;
- 5) Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas program/kegiatan;
- 6) Pembinaan pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten ke desa, termasuk monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- 7) Pengawasan camat, meliputi pemeriksaan bukti kegiatan, observasi fisik, dan wawancara untuk menjaga akuntabilitas.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

adalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan kemampuan SDM dalam melaksanakan pembinaan kepada Desa dikarenakan adanya regulasi yang baru dan belum dilaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan oleh kecamatan;
- b. Ketergantungan pendapatan desa pada ADD dan Dana Desa, sehingga memerlukan penguatan tata kelola dan kualitas belanja desa.

Tabel 3.29

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan musrenbang yang diikuti oleh lembaga masyarakat se kecamatan Kesamben memberi dampak positif bagi pembangunan daerah
...	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pembinaan BUMDES dilaksanakan melalui Bimtek bagi pengelola BUMDES di seluruh desa Se Kecamatan Kesamben.

		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelaksanaan pembinaan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan dilaksanakan melalui pembinaan karakter keluarga, sosialisasi pentingnya pendidikan bagi keluarga, dan pembinaan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh kecamatan baik dalam penyusunan APBDes/APBDesP dan perdes/Perkades meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa
			Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan	Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi

			Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dilaksanakan oleh kecamatan memberi dampak meningkatnya pemahaman desa tentang pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

i. Sumber: Kecamatan Kesamben 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan adalah sebesar Rp.80.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.80.650.000,00.

Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan.

Tabel 3.30
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian
sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.900.000	50.800.000	99,80
			Kegiatan Fasilitasi,	50.900.000	50.800.000	99,80

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.800.000	12.800.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.100.000	6.100.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.750.000	6.750.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.700.000	6.700.000	100
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4.500.000	4.500.000	100
			Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.550.000	9.450.000	98,95
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	4.500.000	4.500.000	100

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kecamatan			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.850.000	29.850.000	100
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.950.000	13.950.000	100
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.050.000	7.050.000	100
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.900.000	6.900.000	100
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.720.000	12.707.000	99,9
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan	15.900.000	15.900.000	99,9

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Bernegara			
			Realisasi Anggaran	80.750.000	80.650.000	99,94
			Tingkat efisiensi			0,06 %

Sumber: Kecamatan Kesamben 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,94%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan dengan nilai efisiensi sebesar 0,06 %. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp 80.750.000,00 realisasi sebesar Rp 80.650.000,00 menunjukkan adanya efisiensi sebesar 0,06% yang berasal dari penggunaan anggaran pembinaan kepada masyarakat yang dapat dilakukan penghematan sehingga dapat di efisiensi penggunaannya.

2. Efisiensi SDM

Sumber daya manusia yang ada dapat dimaksimalkan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada dapat melaksanakan tugasnya dalam hal pembinaan meskipun dalam anggaran yang minimal.

3. Efisiensi Waktu

Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target waktu dan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan.

DOKUMENTASI KEGIATAN
sasaran meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan



Rapat Koordinasi dengan Para Kepala Desa



Peninjauan Lokasi pembangunan KDMP



Evaluasi APBDes Perubahan



Kegiatan Opname Fisik



Kunjungan Bupati Blitar Ke Pasar Kesamben



Kegiatan PKK Kecamatan

2. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Angka Kriminalitas di Kecamatan. Definisi operasional dari indikator Angka Kriminalitas di Kecamatan adalah Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Dengan rumus penghitungan Angka kriminalitas $= (\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-n}) / \text{jumlah penduduk tahun ke-n} \times 100.000$.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebesar 116,67% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.31

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	7	6	116,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					116,67%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Berdasarkan tabel 3.31 diatas, dari target angka kriminalitas 7 pada Tahun 2025 terealisasi 6 sehingga capaian adalah 116,67%.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tidak dapat disandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya karena indikator pada periode resntra 2021-2025 berbeda dengan periode renstra 2025-2029. Sehingga capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029.

Tabel 3.32
Data Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Kejadian	Jumah Gangguan Trantibum	Jumlah Gangguan yang belum diselesaikan	Jumlah gangguan trantibun yang diselesaikan
1	Pencurian	5	0	5
2	Perampokan	0	0	0
3	Perjudian	0	0	0
4	Penipuan	0	0	0
5	Tindak Asusila	1	0	1
6	Penyalahgunaan Narkoba	0	0	0
Jumlah		6	0	6

Sumber : Polsek Kesamben

Tabel 3.33
Pencapaian Kinerja
Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir rentra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	7	6	116,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					116,67%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan Tetangga maka capaian ini adalah sama. dapat disimpulkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan kesamben dan sekitarnya cenderung kondusif. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang memiliki karakter yang hampir sama di wilayah ini, dimana masyarakat Blitar bagian timur dan selatan masih menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian pada lingkungan sehingga kondisi wilayah cenderung aman. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan, TNI/Polri dan masyarakat memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja.. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wlingi.

Tabel 3.34

Perbandingan capaian kinerja di Kecamatan Tetangga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan Binangun	Realisasi Kecamatan Wlingi
1	Meningkatnya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	6	14,74	14

Sumber:Kecamatan kesamben, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan aduan yang masuk dari masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
- Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya;
- Dilakukannya koordinasi lintas instansi terutama dengan TNI/Polri dan tenaga relawan dari Ormas (RAPI, Perguruan Silat, Pecalang, Forkom, Banser) di wilayah Kecamatan Kesamben untuk sinergitas program/kegiatan
- Dilaksanakan kegiatan konkrit mencakup koordinasi dengan pemuka agama untuk sosialisasi supremasi hukum, fasilitasi pengamanan bencana, serta pembinaan siskamling (sistem keamanan lingkungan). Pendekatan persuasif seperti surat teguran dan preventif seperti peningkatan kesadaran masyarakat juga telah diterapkan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam

pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman dan Ketertiban umum adalah sebagai berikut.

- Kurang terjalannya komunikasi yang baik antar lembaga sehingga ada masalah yang lambat dalam penyelesaian;
- Keterbatasan personil Trantib

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.35

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi yang intensif dengan Polsek, Koramil dan Banser, pecalang, Forkom, Rapi
...	...	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi dan Bimtek meningkatkan kapasitas SDM dalam Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sumber Kecamatan Kesamben , 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum adalah sebesar Rp.70.955.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 70.939.000,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran sasaran meningkatnya meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3.36
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya
Ketentraman dan ketertiban umum

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	116,67%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.955.000	70.939.000	99,98
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.045.000	32.029.000	95,77
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.945.000	25.929.000	99,94
			Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.100.000	6.100.000	100
			Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	7.030.000	7.030.000	100

N o.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.880.000	31.880.000	100
			kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.880.000	31.880.000	100 %
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.600.000	13.600.000	100 %
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.150.000	8.150.000	100

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.130.000	10.130.000	100
			Realisasi Anggaran	70.955.000	70.939.000	99,98
			Tingkat efisiensi			0,02%

Sumber: Kecamatan Kesamben ,2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 116,67% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,98%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan nilai efisiensi sebesar 0,02%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp 70.955.000,00 terealisasi sebesar Rp Rp 70.939.000,00 menunjukkan adanya hemat anggaran sebesar 0,02% yang merupakan penghematan dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pada penyelenggaraan upacara.

3. Efisiensi SDM

Dengan keterbatasan jumlah personil kecamatan, namun SDM yang mumpuni sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

4. Efisiensi Waktu

Durasi atau waktu yang digunakan telah sesuai dengan perencanaan kinerja. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kesamben

DOKUMENTASI KEGIATAN
sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum



Memantau kejadian bencana angin puting beliung di desa jugo, bahu jalan ambrol di desa tepas dan Pagar Longsor di SMAN I kesamben



Evakuasi Korban Ledakan tabung gas bersama TNI/POLRI dan Warga masyarakat di Desa Siraman



Pisah Sambut Danramil 0808/014



Monitoring Persiapan Lomba Siskamling



Penyuluhan Hukum Jaksa Jaga Desa



Apel dalam rangka pengaman Nataru

3 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP . Definisi operasional dari indikator Nilai SAKIP adalah Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dengan rumus penghitungan : \sum komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD adalah sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.37
Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,35	73,35	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					100%

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029. yang berarti telah melebihi target tahun terakhir Renstra.

Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra

Tabel 3.38
Pencapaian kinerja sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n (2025)	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	72	73,35	101,87 %

Sumber: Kecamatan kesamben ,2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan Tetangga maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada Kecamatan Binangun dan kecamatan Wlingi.

Tabel 3.39
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisa si	Realisasi Kecamatan Binangun	Realisasi Kecamatan Wlingi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,35	72,90	58,33

Sumber: Kecamatan kesamben, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a. Adanya Komitmen Pimpinan dalam memantau dan mengawal pelaksanaan kegiatan, mengawal permasalahan dan melakukan analisa resiko kecamatan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat;
- b. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- c. Koordinasi rutin antara camat, sekretaris, kasi dan staf untuk mensukseskan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang ada dan cara pemecahan terbaiknya;
- e. Peningkatan pemahaman staf terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- f. Reviu dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk memastikan keselarasan antar Renstra, program, dan indikator

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Sumber daya manusia di Kecamatan Kesamben sehingga menyebabkan capaian kinerja tidak maksimal;
- 2) Kurangnya keselarasan dokumen perencanaan, orientasi hasil yang lemah, dan keterkaitan program dengan Renstra;
- 3) Keterbatasan tim percepatan SAKIP dan minimnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja Dalam menunjang keberhasilan pengukuran kinerja.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.40

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel mendukung pencapaian kinerja.
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Pengelolaan anggaran yang akuntabel mendukung pencapaian kinerja.

			Daerah	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembinaan pegawai dan pelayanan pada pegawai meningkatkan kepuasan pegawai pada pelayanan kecamatan
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan kebutuhan memberi pengaruh yang positif bagi pencapaian kinerja kecamatan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang yang akuntabel dan berkompeten membantu pencapaian kinerja kecamatan baik
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan pemeliharaan Barang milik daerah menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kecamatan maksimal.

Sumber: Kecamatan kesamben 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya sasaran meningkatnya Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 1.953.630.859,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.884.912.574,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.41
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	101,87 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.953.630.859	1.884.912.574	98,38%
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.918.000	3.897.000	99,46
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.918.000	3.897.000	99,46
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.485.448.815	1.422.000.707	99,54
			Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.440.778.815	1.377.330.707	95,60
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.060.000	39.060.000	100

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.080.000	4.080.000	100
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.530.000	1.530.000	100
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.850.000	2.850.000	100
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.850.000	2.850.000	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	4.500.000	90
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	4.500.000	90
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.494.350	81.301.000	99,76
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.112.500	4.030.000	97,99
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.565.600	3.506.000,	98,33
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.281.750	3.235.000	98,58
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.840.000	7.840.000	100
			Penyelenggaraan Rapat			99,99

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.844.500	58.840.000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.850.000	3.850.000	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.926.100	20.757.000	99,19
			Pengadaan Mebel	0	0	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.926.100	20.757.000	99,19
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.563.594	116.296.279	81,98
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.089.000	24.228.496	89,44
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.114.500	25.910.000	99,22
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.360.094	66.157.783	99,70
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.430.000	233.310.588	99,52
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000	67.156.588	99,94
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000	8.520.000	99,53
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.670.000	157.634.000	99,35

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Realisasi Anggaran	1.953.630.859	1.884.912.574	98,38
			Tingkat efisiensi			1,62%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 101,87% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98,38%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 1,62%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp 1.953.630.859,00 realisasi Rp 1.884.912.574,00 menunjukkan adanya penghematan sebesar 1,62% yang berasal dari penggunaan anggaran untuk belanja modal peralatan kantor, disamping itu terdapat sisa pagu anggaran gaji dan tunjangan pegawai.

2. Efisiensi SDM

Sumber daya manusia dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kesamben. Meskipun minimnya jumlah personil. Namun kinerja dapat tercapai dengan baik.

3. Efisiensi Waktu

Pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja di kecamatan Kesamben dalam kurun waktu 2025 dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh kegiatan dan pelaporan dapat dikerjakan sesuai dengan target waktu



Monitoring Admindak desa Kesamben



Bimbingan teknis tata kelola jaringan internet desa



Rapat staf

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3..42
Realisasi Keuangan

No	Sasaran	Program	Anggaran		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.850.000,00	29.850.000,00	100
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.900.000,00	50.800.000,00	99,80
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.075.000	39.059.000	96,50
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	31.880.000,00	31.880.000,00	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.953.630.859	1.884.912.574	98,38
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	29.770.000	29.740.000	99,90

Sumber:Kecamatan Kesamben, 2025

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam realisasi keuangan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber daya manusia di Kecamatan Kesamben, dan Kurangnya kapasitas SDM dalam penganggaran berbasis kinerja, termasuk indikator output/outcome yang tidak memadai.;
 2. Kegiatan pelayanan di Kecamatan belum sepenuhnya berbasis teknologi digital. Sehingga ada beberapa pelayanan surat menyurat yang dinilai masih belum optimal;
 3. Pengelolaan risiko yang kurang optimal;
- langkah –langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diusulkan penambahan jumlah personal dan sumber daya pendukung di Kecamatan

Kesamben;

2. Dilakukan koordinasi dengan OPD terkait serta lintas sektor dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa serta pembardayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan Kesamben;
3. Dilakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas untuk perangkat desa agar meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang pelaksanaan pemerintahan, administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja tahun 2025

N o.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata – rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	107,53 %	107,53 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	105,26 %	105,26%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	103,31 %	103,31%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	98,59 %	99,30%	Sangat Tinggi
		Jumlah Bumdes yang dikelola dengan baik	100%		
	Rata-rata capaian kinerja PD			103,85	Sangat Tinggi

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

Tabel 4.2
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata – rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	107,53 %	107,53 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	105,26 %	105,26%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	103,31 %	103,31%	Sangat Tinggi
	Rata-rata capaian kinerja PD			103,85	Sangat Tinggi

Sumber: Kecamatan Kesamben, 2025

B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja di semua sasaran kinerja sudah tercapai sesuai target, sehingga untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran yang lebih baik lagi pada Kecamatan Kesamben .Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.3
Rencana Tindak Lanjut

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Perlu ditingkatkan pelaksanaan pembinaan kepada Pemerintah Desa sehingga Desa mengalami peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan keuangan desa agar dapat terwujud desa Mandiri
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Perlu lebih ditingkatkan kerja sama dan koordinasi dengan TNI/Polri dan Tokoh Masyarakat/Organisasi Masyarakat di wilayah Kecamatan Kesamben agar tercipta sinergitas untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kesamben
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi SDM di Kecamatan Kesamben agar terwujud akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Disamping itu diperlukan pula adanya manajemen resiko agar setiap kendala dapat diatasi dengan tepat sehingga tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : Kecamatan Kesamben 2025

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Pohon Kinerja
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Rencana Aksi Perangkat Daerah



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMIR BHARATA, ST, M.Si.**

Jabatan : CAMAT KESAMBEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIJANTO**

Jabatan : BUPATI BLITAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RIJANTO
BUPATI BLITAR

Blitar, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama,

AMIR BHARATA, ST. M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.197601162002121003

